

251.431  
poe  
E a

**EKSISTENSI BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENANGANI  
PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM SETELAH  
BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974  
DI KOTA SEMARANG**



**TESIS**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S-2**

**Magister Kenotariatan**

**Disusun oleh :**

**Didik Poerwono, SH  
B4BOO2O84**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2005**

## Tesis

EKSISTENSI BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENANGANI  
PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM SETELAH  
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974  
DI KOTA SEMARANG

Disusun Oleh :

DIDIK POERWONO, SH

B4BOO2O84

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal.....29-3-.....2005


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Mengetahui Pembimbing,

  
Prof. H. Abdullah Kelib, SH

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

  
Mulyadi, SH, MS

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada suatu perguruan tinggi atau Lembaga Pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Maret 2005

Yang Menyatakan,



Didik Poerwono SH

B4B002084

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan berkah dan anugerahNya melalui ujian yang menuntut kesabaran dan ketekunan, maka penulisan tesis yang berjudul “Eksistensi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menangani Perkawinan Menurut Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kota Semarang. dapat terselesaikan dengan baik dimana penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan study dan memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat S2 pada Program Pasca Sarjana Study Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Jawa Tengah.

Motivasi penulisan tesis ini disamping guna melengkapi literatur di bidang hukum Islam dan khususnya hukum keperdataan, yang dirasa masih kurang sehingga bisa memberikan kontribusi kepada khasanah ilmu pengetahuan hukum islam, juga bertujuan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif tentang eksistensi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga akan meningkatkan mutu dan kualitas perkawinan di masa yang akan datang.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan hanya dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu maka penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Prof. H Abdullah Kelib, SH sebagai pembimbing yang telah

memberikan pengarahannya masukan-masukan dan kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.

Selama pendidikan di Program Pascasarjana Study Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sampai pada proses penulisan, seperti penyusunan rancangan penelitian, study kepustakaan, pengumpulan data di lapangan dan hasil penelitian Tesis, penulis banyak mendapat bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang sangat berarti bagi penulis dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. Ir Eko Budiharjo, MSC, selaku rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. DR. Dr Soeharyo Hadisaputro, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Mulyadi, SH, MS selaku Ketua Program Study Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Yunanto, SH, MH selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Zubaidi, SH Mhum dan Ibu Ro'fah, SH Mhum selaku team penguji Tesis yang dengan penuh kesabaran memberikan kritik dan saran untuk perbaikan karya ilmiah penulis.
6. Bapak Agus M Natsir, SH, dan Ibu Azizah, selaku anggota BP4 URAIS Kandepag Kota Semarang.
7. Ibu Dra Chuwaisoh selaku Sekretaris BP4 URAIS Kandepag Kota Semarang.

8. Bapak Drs H. Koesjono selaku kepala BP4 Kecamatan Semarang Barat.  
Yang telah memberikan ijin riset.
9. Bapak Moch Rodi dan Bapak Saefuddin S Ag, selaku anggota Penasihat BP4 di Kecamatan Semarang Barat, yang telah memberikan waktunya untuk memberikan masukan-masukan pada tesis ini.
10. Para Guru Besar dan Staf pengajar Program Study Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara profesional memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah.
11. Bapak ibu Tata Usaha Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
12. Bapak Bambang SH MKn, Robertus Verhoeven SH, Deni Yohanes SH , Sri Widyawati SH, MKn serta rekan rekan semua yang tidak jenuh-jenuhnya memberikan semangat pendapat dan saran agar penulis segera untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga kebaikan teman teman dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga persahabatan kita tetap berlanjut.
13. Terima kasih kepada Ibundaku tercinta, Dra Hj Siti Ngadiati atas doa, nasihat, pengorbanan, kasih sayang dan dorongan baik moril maupun materiil. Serta semua saudara-saudara Keluarga Drs Teguh Hariyono Mulud, juga adik-adikku Kapten laut Ida Dwiningsih S Kep, Tri Sulisty, ST, Poni Turdiati SE. juga almarhum ayahku Drs Soenardi H yang memberi inspirasi untuk melanjutkan jenjang sekolah yang lebih tinggi.

14. Calon istriku tercinta Niken Kusumaningrum S Ked, yang senantiasa memberikan dorongan semangat yang tulus juga Bapak Dr Budiono Santoso, Sp OG dan Ibu Dra Titik rochayati
15. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah begitu banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian ini sejak awal sampai dengan terselesaikannya tesis ini.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati akan kurang sempurnanya tulisan ilmiah ini mengingat waktu, biaya serta pengalaman penulis yang sangat terbatas. Amun demikian penulis telah berusaha dan bekerja keras untuk sempurnanya tesis ini sehingga tesis ini dapat tersusun dengan baik. Untuk itu atas semua kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan tesis ini, senantiasa akan diterima penulis dengan senang dan rendah hati.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua.

Semarang    Maret 2005



(Didik Poerwono SH)

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 10
A. Pengertian Perkawinan.....	10



B. Tujuan Perkawinan.....	11
C. Syarat-syarat dan Rukun Perkawinan.....	13
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan.....	23
E. Harta Benda Dalam Perkawinan.....	30
F. Putusnya Perkawinan.....	32
G. Pengertian, Prosedur dan Macam-macam Thalaq.....	34
H. Syarat Terjadinya Rujuk.....	40
 <b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A..Metode Pendekatan.....	44
B. Spesifikasi Penelitian.....	45
C. Populasi.....	46
D. Metode Penarikan Sampel.....	46
E. Metode Pengumpulan Data.....	46
F. Metode Penyajian Data.....	48
G. Metode Analisa Data.....	48
 <b>BAB IV. HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Eksistensi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menangani perkawinan menurut Hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di Kota Semarang.....	50
B. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Penasihat, Pem-	

Binaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam me- Nangani perkawinan menurut hukum Islam setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di Kota Semarang.....	65
 BAB V. PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran.....	81
 DAFTAR PUSTAKA.....	83
 LAMPIRAN.	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A Latar Belakang**

Dalam kehidupan sehari-hari manusia saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia mempunyai watak dan sifat yang berbeda beda dengan berbagai kepentingan. Dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya kadang saling bertentangan tetapi sebaliknya mereka dapat saling berdekatan apabila kepentingan itu saling menguntungkan. Salah satu interaksi antar sesama manusia yaitu dengan melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan awal hidup bersama antara laki-laki dan wanita sebagai suami istri.

Arti perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena merupakan ikatan lahir bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka bagi bangsa Indonesia suatu perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan nafsu biologi semata, akan tetapi merupakan sesuatu yang sakral.<sup>1</sup> Hal ini lebih lanjut tersirat dalam penjelasan Pasal 1 tersebut di atas yang berbunyi sebagai berikut :

“Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan

---

<sup>1</sup> K Wantjik Saleh, SH, 1974, Hukum Perceraian Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 14

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan keturunannya, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga melalui perkawinan, tentu menginginkan terciptanya suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan bathin serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat nanti. Dari keluarga bahagia sejahtera inilah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai serta adil dan makmur material dan spiritual. Selain itu dalam tiap keluarga juga dituntut untuk membentuk keluarga yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa agama hendaknya dijadikan sendi dasar dalam kehidupan keluarga.

Kehidupan keluarga dan masyarakat semacam inilah yang menjadi cita-cita dan tujuan pembangunan nasional yang sedang dan akan dilaksanakan terus oleh pemerintah dan rakyat Indonesia.

Untuk mencapai tujuan yang luhur dari setiap perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan ditetapkan adanya prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Membentuk Keluarga Yang Bahagia Dan Kekal.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Sahnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama.

Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan atau akte.

3. Monogami.

Undang-Undang ini menganut asas monogami. Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Tetapi perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan,

---

<sup>2</sup> Farida Ariani, Hj, Dra, 2001, Pedoman Konselor Keluarga Sakiah, Departemen Agama R.I. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, Jakarta, hal 2

hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

#### 4. Pendewasaan Usia Perkawinan.

Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu maka Undang-Undang ini menentukan batas waktu untuk kawin baik pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enambelas) tahun bagi wanita.

#### 5. Mempersukar Perceraian

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, yang untuk pelaksanaannya harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

#### 6. Kedudukan Suami Istri Seimbang.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Tujuan perkawinan di dalam al Quran juga ada sebagai ungkapan cinta kasih yang diberikan Tuhan kepada sebuah rumah tangga yaitu *Sakinah, Mawaddah Wa rahmah* yaitu bahwa orang yang telah kawin diharapkan mendapat ketenangan diantara suami istri dan anak-anaknya. Rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* ini merupakan mempunyai peran yang besar bagi ketentraman bangsa dan keamanan negara serta akan tercipta generasi yang berkualitas sesuai dengan dasar perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Agar cita-cita dan tujuan itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami istri yang memegang peran utama dalam mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat, diharapkan setiap anggota keluarga khususnya suami istri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Stabilitas kehidupan rumah tangga inilah yang merupakan modal dasar bagi berbagai upaya pembinaan keluarga bahagia dan sejahtera.

Seseorang yang telah menikah diharapkan mendapatkan ketenangan dengan kawan hidupnya antara suami dengan istri dan sebaliknya, anak-anak akan mendapatkan pengayoman dari orang tuanya, dan orang tua akan mendapat penghormatan dari anak-anaknya. Rumah tangga atau keluarga yang diliputi cinta kasih atau istilah sakinah, mawaddah warahmah

Setiap muslim pasti mengidamkan rumah tangga yang ideal dalam menjalankan bahtera perkawinan, mengisi kehidupan rumah tangga dan yang lain, selain memenuhi naluri jasmaniah, tuntutan kehidupan bermasyarakat juga menjalankan syariat agama, karena tanpa terpenuhi syariat agama mustahil suasana sakinah, mawaddah warahmah akan tercipta dalam suatu rumah tangga.

Namun dalam masyarakat tidak jarang terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga, yang akan membawa akibat sesuatu yang tidak diinginkan seperti putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena perceraian yang dapat menimbulkan hal-hal negatif seperti kurang terurusnya anak sampai pandangan jelek dari masyarakat terhadap janda yang ditinggalkan selain itu juga akan timbul masalah mengenai harta bersama.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari suatu perkawinan jika terjadi perceraian maka diperlukan suatu lembaga yang bisa memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan dalam rumah tangga. Lembaga tersebut adalah Badan penasihat, pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).



Didorong oleh rasa tanggung jawab untuk turut serta menunjang dan mensukseskan program pembangunan nasional melalui pembinaan keluarga, BP4 mencoba memberikan sumbangan pikiran mengenai bimbingan penasihatan yang penting untuk diketahui dan dipedomi oleh seluruh lapisan masyarakat umumnya serta suami istri khususnya, tentang upaya membina keluarga bahagia dan sejahtera.

Berdasarkan konsep pemikiran diatas menjadi dasar bagi penulis untuk mengangkat judul dalam tesis ini :

EKSISTENSI BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENANGANI PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KOTA SEMARANG.

#### **B. Perumusan Masalah**

Sebelum penulis menyampaikan perumusan masalah dalam tesis ini terlebih dulu akan dibahas mengenai cara merumuskan masalah. Tidak ada aturan umum mengenai cara merumuskan permasalahan, tetapi dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Permasalahan hendaknya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya
- b. Perumusan itu hendaknya padat dan jelas
- c. Perumusan itu hendaknya memberi petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data guna menjawab pertanyaan yang terkandung dalam perumusan itu

Dari perumusan masalah yang dikemukakan haruslah dapat diketahui manfaat (signifikansi) dari penelitian itu yang diharapkan dapat menemukan pemecahan atau jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan itu. Manfaat ilmiah dari suatu penelitian juga harus ditonjolkan<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan yang sekaligus merupakan pembatasan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi Badan penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menangani perkawinan menurut hukum islam setelah berlakunya Undang-Undang no 1 tahun 1974 di Kota Semarang ?
2. Apa kendala yang dihadapi Badan Penasihat, Pembinaan dan, Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menangani perkawinan menurut hukum islam setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami eksistensi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menangani perkawinan menurut hukum islam setelah berlakunya Undang-Undang no 1 tahun 1974 di Kota Semarang

---

<sup>3</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, SH, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 39

2. Untuk memahami kendala yang dihadapi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menangani perkawinan menurut hukum islam setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan bagi para pihak di bidang hukum islam.
2. Secara teoritis, diharapkan juga hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kalangan akademis dalam mempelajari hukum islam.

## **BAB II**

### **Tinjauan Pustaka**

#### **A. Pengertian Perkawinan**

Menurut Subekti : “perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.<sup>4</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor I tahun 1974 adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Demikian ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Perkawinan sebagai ikatan lahir dan bathin seseorang yang merupakan bentuk pengejawantahan dari pengertian bahwa perkawinan bukanlah sekedar ikatan lahir atau bathin saja namun harus kedua-duanya.<sup>5</sup>

Menurut hukum adat perkawinan “urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan”<sup>6</sup>

Dari pengertian-pengertian perkawinan tersebut maka ada unsur kesamaan dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 dimana perkawinan mengandung unsur-unsur:

1. Ikatan lahir bathin
2. Adanya seorang pria dan wanita

---

<sup>4</sup> Subekti, 1984, Pokok-pokok Hukum Perdata, Internusa, Jakarta, hal 13

<sup>5</sup> Wantjik Saleh, 1976, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 14

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, 1991, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hal 90

4. Tidak terbatas waktunya
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengertian tersebut merupakan rumusan dari arti, sifat, dan tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Pengertian- pengertian perkawinan yang dikemukakan para sarjana diatas, pada intinya memandang perkawinan sebagai suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

## **B. Tujuan Perkawinan**

Adapun tujuan perkawinan yang bersifat kekerabatan pada hukum adat adalah mempertahankan dan meneruskan keturunan gais kebapaan atau keibuan atau keibu bapaan untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat untuk memperoleh nilai nilai adat, budaya dan kedamaian, dan mempertahankan kewarisan.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagian besar suku-suku bangsa Indonesia beragama islam, maka hukum adat mereka dilandasi hukum islam, maka tujuan perkawinan secara tidak

---

<sup>7</sup> Soetojo Prawirohamidjoyo R, 1980, Hukum Orang dan Keluarga, Alumni Bandung, hal 13

<sup>8</sup> Ibid hal 23

langsung sesuai dengan tujuan perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam, yaitu:<sup>9</sup>

1. Menegakkan agama Allah, dalam arti menaati perintah dan menjauhi larangan Allah
2. Mencegah maksiat, terjadinya perzinahan dan atau pelacuran
3. Menjalankan sunnah Nabi
4. Melanjutkan serta meneruskan garis keturunan
5. Mempererat tali silaturahmi antar dua keluarga

Dalam Pasal 2 hukum perkawinan dalam islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur

Tujuan perkawinan sebagai tersebut dalam Pasal 2 adalah berdasar atas

A. Firman Allah dalam surat An Nisa ayat 3

Artinya : hendaklah kamu nikahi yang baik bagimu diantara wanita

B. Sabda nabi SAW

Artinya: Hai sekalian pemuda, siapa yang sanggup bersetubuh (karena ada belanja nikah), hendaklah berkawin. Maka nyatalah bahwa Allah dan RasulNya menganjurkan perkawinan, sebab itu umat islam berkawin karena mengikut perintah Allah.

C. Firman Allah dalam surat Arrum 21

Artinya: Dan diantara keterangannya bahwa Ia (Allah) menjadikan istri bagimu dan bangsamu, supaya boleh kamu tinggal (dengan damai)

---

<sup>9</sup> Ibid hal 24

bersama dia serta menjadikan berkasih sayang dan cinta mencintai antara kamu. Sungguh yang demikian menjadi ayat (keterangan) bagi kaum yang berpikir. Menurut keterangan ayat itu nyatalah tujuan perkawinan

Perkawinan yang tidak dapat mendirikan rumah tangga dengan damai dan berkasih sayang serta cinta mencintai antara kedua suami istri maka telah terjauh dari tujuan perkawinan yang sebenarnya.<sup>10</sup>

### **C. Syarat-syarat dan rukun perkawinan**

Menurut Pasal 6 Undang undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, syarat-syarat perkawinan meliputi:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari

---

<sup>10</sup> Mahmud Yunus, H, DR, Prof, 1991, Hukum Perkawinan Dalam Islam, PT Hidakarya Agung, Jakarta, hal 2

wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3), dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah :

1. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini,



berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

### Syarat Perkawinan

a. Syarat menurut syariat islam adalah sebagai berikut :

Bagi calon pengantin pria sebagai berikut :

1. Beragama Islam.
2. Laki-laki
3. Jelas orangnya
4. Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga
5. Tidak dipaksa.
6. Tidak beristri empat orang.
7. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
8. Mengetahui calon istri tidak haram dinikahnya.
9. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

Calon pengantin wanita sebagai berikut :

1. Beragama Islam.
2. Perempuan
3. jelas orangnya
4. Dapat dimintai persetujuannya
5. Tidak bersuami dan tidak dalam iddah.
6. Bukan mahram calon suami.

7. Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh calon suami.
8. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

Syarat-syarat wali dari calon mempelai wanita sebagai berikut :

1. Laki-laki
2. Beragama islam
3. Mempunyai hak atas perwalian
4. Baligh
5. Berakal
6. Tidak terdapat halangan untuk menjadi wali
7. Terang lelakinya
8. Adil
9. Tidak sedang ihrom haji atau umrah
10. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah
11. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.

Syarat-syarat saksi

1. Beragama islam
2. Dua orang laki-laki
3. Baligh
4. Berakal
5. adil
6. Mendengar (tidak tuli)

7. Melihat (tidak buta)
8. Bisa bercakap-cakap (tidak bisu)
9. Tidak pelupa
10. Menjaga harga diri
11. Tidak merangkap menjadi wali
12. Dapat mengerti maksud akad perkawinan
13. Hadir dalam acara akad perkawinan

Bagi akad nikah, syaratnya :

1. Adanya ijab (penyerahan) dari wali
2. Adanya qobul (penerimaan) dari calon suami
3. Ijab dengan menggunakan kata-kata nikah
4. Antara ijab dan qabul harus jelas
5. Antar ijab dan qabul masih dalam satu majlis
6. Orang yang berijab qabul tidak sedang berihram.

Perkawinan merupakan masalah yang penting bagi mereka yang melangsungkan perkawinan itu sendiri maupun dalam hubungannya dengan masyarakat, serta aspek-aspek sosial lainnya.

Walaupun dalam hukum adat kita belum dapat dijumpai tentang syarat sahnya suatu perkawinan tetapi kita dapat menjumpai syarat yang bersifat umum yang berlaku bagi semua golongan atau masyarakat yaitu:

1. Persetujuan suka rela dari kedua belah calon suami istri, kecuali kalau calon pengantin belum dewasa. Hukum adat masih mengenal perkawinan anak-anak, dimana hidup berkumpul sebagai suami istri ditangguhkan

sampai mencapai umur yang pantas (jawa: gantung kawin). Dalam hal ini hukum adat tidak mengenal batas tertentu sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan.

2. Persetujuan keluarga atau orang tua kedua belah pihak (terutama bagi calon mempelai yang belum dewasa), mengingat bahwa soal perkawinan merupakan urusan keluarga atau oleh orang yang bersangkutan.

Menurut hukum islam perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan ialah, bahwa rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakikat perkawinan.

Rukun perkawinan itu sendiri yaitu :

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali. Pernikahan harus dilangsungkan dengan wali. Apabila dilangsungkan tidak dengan wali, atau yang menjadi wali bukan yang berhak maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Dimana wali ada 3 macam yaitu :

- i. Wali nasab : orang-orang yang terdiri dari keluarga calon pengantin perempuan. Orang-orang tersebut adalah keluarga calon pengantin perempuan yang berhak menjadi wali dengan urutan sebagai berikut :

1. Orang laki-laki yang menurunkan calon pengantin perempuan dari keturunan laki-laki murni atau dalam garis itu tidak ada penghubung yang perempuan ( seperti : ayah, ayah dari ayah dan

seterusnya keatas). Sedangkan ayah dari ibu atau ayah dari ibu si ayah tidak berhak menjadi wali, karena dalam garis keturunan itu terdapat penghubung wanita yang berarti garis keturunan pria sudah tidak murni lagi dengan terdapat jenis wanita sebagai penghubung dalam keturunan tersebut.

2. Orang laki-laki keturunan dari ayah pengantin perempuan dalam garis laki-laki murni (yaitu : saudara laki-laki sekandung, saudara seayah, anak dari saudara sekandung, anak dari saudara seayah dan seterusnya ke bawah). Sedangkan saudara seibu, anak saudara wanita atau anak dari anak wanita saudara pria tidak berhak menjadi wali karena dalam garis keturunannya terdapat penghubung wanita (garis yang menghubungkannya melalui seorang wanita).
3. Orang laki-laki keturunan dari ayahnya ayah dalam garis laki-laki murni (seperti : saudara kandung dari ayah, saudara seapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah dan seterusnya kebawah). Sedangkan saudara seibu dari ayah, anak saudara wanita dari ayah atau dari anak wanita si ayah tidak

berhak menjadi wali karena dalam garis keturunan itu terdapat penghubung wanita seperti : pria keturunan dari ayahnya si ayah dan seterusnya.

Apabila wali tersebut diatas tidak beragama islam sedangkan calon mempelai wanita beragama islam atau wali-wali tersebut diatas belum balig, atau tidak berakal atau rusak pikirannya atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis maka hak menjadi wali pindah kepada wali yang berikutnya.

ii. Wali hakim : orang yang diangkat pemerintah atau oleh lembaga masyarakat dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Apabila seorang calon pengantin perempuan :

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
2. Walinya tidak tentu rimbanya/ tidak tahu keberadaannya
3. Wali sendiri yang akan menjadi pengantin laki-laki, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.
4. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
5. Wali tidak bersedia atau menolak menikahkan.
6. Walinya sedang menunaikan ibadah Haji atau Umrah.
7. Wali berada di tempat yang jaraknya sangat jauh minimal 92,5 km.

iii. Wali muhakkam : seorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.

d. Aqad nikah (ijab dan qabul). Mengenai ijab harus dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan qabul harus dari pihak laki-laki, calon suami atau wakilnya. Ijab adalah serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah untuk menerimakan nikah calon suami atau wakilnya. Sedang qabul ialah serangkaian kata-kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah/wakilnya. Untuk sahnya ijab qabul, ijab harus menggunakankata-kata yang jelas dan tegas, menyebut wanita yang akan diijab kan juga dengan jelas dan tegas pula. Ijab itu harus ditujukan kepada mempelai pria yang bersangkutan. Antara ijab dan qabul itu tidak boleh diselingi kata-kata lain.

Contoh :

- a. Ijab dari Wali calon mempelai perempuan : "Hai Pulan. Aku nikahkan atau aku kawinkan si pulan anak saya dengan engkau, dengan mas kawinnya (maharnya) Rp.....
- b. Kabul dari calon mempelai pria : "Aku terima nikahnya.....dengan mas kawinnya (maharnya) Rp.....

- e. 2(dua) orang saksi. Aqad nikah harus dihadiri oleh 2 orang saksi laki-laki, muslim, baliq, berakal, melihat, mendwengar dan faham akan maksud aqad nikah, lagi adil. Saksi merupakan alat pembuktian dari perkawinan yang dilangsungkan, sebelum adanya pencatatan dan sebelum adanya akte perkawinan.

Semuanya itu adalah sebagian dari hakikat perkawinan, dan tidak dapat terjadi suatu perkawinan, kalau tak ada misalnya laki-laki dan perempuan. Maka demikian itu dinamakan rukun perkawinan.

Adapun syarat ialah sesuatu yang mesti ada dalam perkawinan, tetapi tiada termasuk salah satu bahagian dari pada hakikat perkawinan itu, misalnya syarat wali itu laki-laki, baliq, berakal dsb. Salah satu dari rukun perkawinan ialah aqad nikah = ijab dan kabul. Maka perkawinan tidak sah, kalau tiada dilakukan dengan ijab dan kabul. Tentang ini telah sepakat Ulama.<sup>11</sup>

Adapun di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak ditemukan adanya Pasal yang mengatur tentang rukun perkawinan melainkan kita hanya akan menemukan syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 12, tetapi di dalam Undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat 1 ditentukan :

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa rukun perkawinan terdapat di dalam syarat perkawinan, karena menurut hukum islam perkawinan itu

---

<sup>11</sup> Mahmud Yunus, H, RD, Prof, ibid hal 15



harus dianggap sah apabila syarat-syarat dan rukunnya telah dipenuhi. Yang dimaksud dengan syarat perkawinan disini adalah suatu yang harus ada sebelum perkawinan itu dilaksanakan dan harus tetap ada sampai perkawinan itu dilaksanakan.

Meskipun antara syarat dan rukun terdapat perbedaan yang prinsipil tetapi kedua-duanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu perkawinan itu akan batal atau tidak sah, apabila syarat dan rukunnya tidak dipenuhi. Oleh karena itu akan lebih gampang apabila dalam pembahasan selanjutnya penulis menganggap syarat dan rukunnya sebagai satu hal yang sama sesuai dengan fungsinya.

#### **D. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan**

Akibat hukum dari perkawinan antara suami istri menurut Undang-Undang no 1 tahun 1974 ditinjau dari segi hukum islam adalah sebagai berikut : Dengan adanya akad nikah, maka bagi suami istri timbullah hak dan kewajiban diantara suami istri.

Hak dan kewajiban suami istri menurut UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam Pasal 30 dan 31 yaitu :

Pasal 30 dinyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 31 dinyatakan :

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan dari pergaulan hidup bersama dan masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Mengenai kewajiban suami istri selanjutnya di jelaskan dalam pasal 33 Undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu :

“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.

Selanjutnya dalam Pasal 34 dinyatakan :

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Mengenai rumah tinggal sebagai tempat kediaman suami istri dijelaskan dalam pasal 32 sebagai berikut :<sup>12</sup>

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Akibat hukum dari perkawinan tersebut dalam Undang-undang No 1 tahun

---

<sup>12</sup> Sya'roni Ismail, H.M., Drs, 2003, Buku Pintar Keluarga Muslim, Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Propinsi Jawa Tengah, Semarang, hal 11

1974, kalau kita bandingkan dengan ketentuan dalam Al-qur'an, maka akan terdapat persesuaian. Ada beberapa ketentuan dalam Alqur'an yang menunjukkan hak dan kewajiban suami istri.

Hak istri adalah :

- a. Hak mengenai harta, yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah.
- b. Hak mendapat perlakuan yang baik dari suami, agar suami menjaga dan memelihara istrinya, maksudnya ialah menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakannya dan menghentikan segala yang dilarang Allah.<sup>13</sup>

Dalam firman Allah surat An Nisa ayat 19, yang artinya : “..... dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

- c. Mengenai persediaan tempat bagi pihak istri oleh pihak suami terdapat Dalam Al-qur'an surat At-Thalaq ayat 6 yang artinya :  
“tempatkanlah mereka (para istrimu) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka”.
- d. Agar suami menjaga dan memelihara istrinya. Maksudnya adalah menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakannya dan menjaganya

<sup>13</sup> Ar Ba'in Mahmud, H, Drs, 1985, Buku Pintar Keluarga Muslim, Semarang, hal 11

agar selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala hal yang dilarang Allah.

#### Hak Suami Adalah :

Hak suami atas istri adalah :

- a. Istri hendaklah taat kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri.
- b. Mengurus dan menjaga rumah tangga suami, termasuk di dalamnya memelihara anak.

#### Kewajiban istri :

Nabi Muhammad SAW bersabda :

artinya :

:"Wanita yang terbaik ialah wanita yang menarik hatimu bila kau pandang dan taat bila kau perintah, dan tahu menjaga kehormatannya bila kau sedang pergi dan berhati-hati menjaga hartamu". (HR Thabrani)<sup>14</sup>

Maksud hadits tersebut adalah sebagai berikut :

1. Istri yang baik harus dapat melayani apa yang menjadi kesenangan suaminya, rajin merawat dirinya dan mengatur rumah tangga,

---

<sup>14</sup> Sya'roni Ismail, H.M., Drs, 2003, Buku Pintar Keluarga Muslim, Semarang, hal 12

sehingga suasana rumah tangga menyegarkan pandangan dan menyenangkan hati suami dan suami tidak merasa perlu untuk mencari hiburan keluar.

2. Menghormati suami karena suami yang melindungi keluarga dan bekerja keras mencari nafkah serta memenuhi kebutuhan rumah tangga.
3. Bersikap lemah lembut dan sopan santun, serta mengerjakan urusan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.
4. Menerima dengan ikhlas hasil usaha suami dan tidak meminta barang-barang yang sekiranya belum mampu memenuhinya. Jangan memboroskan nafkah yang diberikan suami dan pandai mengatur keuangan.
5. Bila suami sedang pergi tidak berbuat hal-hal yang mencurigakan, misal kan pergi larut malam tanpa alasan, menerima tamu laki-laki di luar batas kesopanan dan lain-lain.
6. Pandai membagi waktu dengan anak, dan jangan sampai mengurangi pelayanan kepada suami. Disinilah letak kebijaksanaan istri.
7. Bila siuami/istri sering berbuat salah, cari waktu yang baik untuk memperingatkan dengan cara ang halus sehingga tidak merasa tersinggung. Taat dan menghormati suami.

**Kewajiban Suami adalah :**

- a. Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir bathin, serta menjaga bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya.
- b. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan.
- c. Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab.
- d. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit apalagi membuat istri menderita lahir dan bathin yang dapat mendorong istri berbuat salah.
- e. Dapat mencari keadaan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.

Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 24 disebutkan :

Yang artinya :

“Laki-laki itu menjadi pemimpin bagi wanita, karena Allah telah memberikan kelebihan sebagian dari yang lain, dan karena laki-laki (suami) telah menafkahkan sebagian dari hartanya”.

Hak bersama di antara kedua suami istri adalah :

- a. Halalnya pergaulan sebagai suami istri, dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerjasama dan saling memerlukan.
- b. Sucinya hubungan perbesanan.

Dalam hal ini istri haram bagi pihak keluarga laki-laki suami, sebagaimana suami haram bagi pihak keluarga perempuan istri.

- c. Berlaku hak pusaka mempusakai.

Apabila salah seorang diantara suami istri meninggal, maka salah satu berhak mewarisi, walaupun keduanya belum bercampur.

- d. Perlakuan dan pergaulan yang baik.

Menjadi kewajiban suami istri untuk saling berlaku dan bergaul dengan baik, sehingga suasana menjadi tenteram, rukun, dan penuh dengan kedamaian.

Kewajiban bersama suami istri sebagai berikut :

- a. Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- b. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Masing masing harus dapat menyesuaikan diri, seia sekata, percaya mempercayai serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
- c. Hormat menghormati, sopan santun, penuh pengertian serta bergaul dengan baik.
- d. Matang dalam berbuat, berpikir serta tidak bersikap emosional dalam memecahkan persoalan yang dihadapi.
- e. Memelihara kepercayaan dan tidak membuka rahasia pribadi.
- f. Sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan masing-masing.

Apabila diperhatikan maka ketentuan-ketentuan di dalam masalah perkawinan menurut hukum islam yang sebagaimana tertera dalam Al qur'an dan

Al Hadits itu ternyata terdapat persesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip keserasian antara suami istri yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 dapat mendukung terlaksananya prinsip keserasian keserasian dalam hukum islam.<sup>15</sup>

#### **E. Harta benda dalam perkawinan**

Akibat hukum yang lain dari sebuah perkawinan adalah terhadap harta benda yang dihasilkan oleh suami istri selama perkawinan atau selama berumah tangga. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaan terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hukum kekayaan dan hukum harta perkawinan yang tidak lain merupakan hukum harta kekayaan keluarga.<sup>16</sup>

Berdasarkan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri didalam perkawinan, maka hukum islam menganggap kekayaan suami istri masing-masing terpisah satu dengan yang lainnya. Barang-barang yang dimiliki masing-masing pada waktu perkawinan dimulai, tetap menjadi milik masing-masing. Demikian pula dari barang-barang yang mereka dapat selama perkawinan berlangsung sebagai hasil pekerjaannya sebagai penghibahan. Karena tidak dicampur melainkan terpisah yang satu dengan yang lain, artinya barang-barang milik istri,

<sup>15</sup> K.N. Sofyan Hasan, SH, dan Markum Sumitro, SH, 1994, Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia, Usaha Nasional, Surabaya, hal 3

<sup>16</sup> J Satrio, SH, 1991, Hukum Harta Perkawinan, PT Citra Aditya, Bandung, hal 16



suami tidak mempunyai hak, sebaliknya barang-barang milik si suami, istri tidak mempunyai hak. Hal ini tidak berarti bahwa suami tidak boleh memakai barang istri dan sebaliknya, tetapi pemakaiannya itu atas dasar perjanjian pinjam-meminjam antara suami istri, perjanjian ini tidak perlu tegas, melainkan secara diam-diam.<sup>17</sup>

Harta perkawinan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan yang kemudian akan menjadi harta bersama dan harta bawaan masing-masing suami istri yang diperoleh dari hadiah atau warisan. Harta bawaan ini berada dibawah penguasaan masing-masing suami istri, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Terhadap harta bersama baik suami maupun istri dapat berhibah atau persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan terhadap harta bawaan atau harta asal, masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukumnya.

Mengenai harta benda ini tidak ada yang mengaturnya dalam Al-Quran, dengan pengertian bahwa hukum islam tidak menentukan tidak pula melarang supaya harta masing-masing dalam perkawinan itu dipisahkan atau dipersatukan

Harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan dalam hukum adat dikenal dengan beberapa istilah, yaitu harta gono gini (Jawa Tengah dan Jawa Timur), guna kaya (Jawa Barat), dan harta suarang (Minang kabau).

Harta bersama itu dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak termasuk surat-surat berharga, sedangkan harta tidak berwujud dapat pula berupa hak dan kewajiban. Harta bersama itu dapat dijadikan barang jaminan oleh salah

---

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, SH, 1974, Hukum Perkawinan di Indonesia, Penerbit Sumur Bandung, hal 107

satu pihak atas persetujuan pihak lain. Baik suami atau istri tidak boleh menjual harta bersama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.

Pada prinsipnya pelaksanaan harta bersama atau harta perkawinan haruslah berwujud harta semula, misalkan harta semula berwujud barang, maka barang itulah yang harus dibagi. Dan jika harta semula itu berwujud uang, maka uang itulah yang harus dibagi diantara suami istri itu .

Di dalam hukum islam itu sendiri mengakui adanya harta yang merupakan milik bagi setiap orang, baik itu mengenai pengurusannya maupun mengenai penggunaannya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu syarikat kerja antara suami istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karena itu jika terjadi perceraian antara suami istri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum islam yang kaidah hukumnya menyebutkan:

“Tak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan.” Dari kaidah hukum inilah hal yang terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta bersama itu secara adil.

#### **F. Putusnya perkawinan**

Ada beberapa sebab dalam suatu perkawinan dapat putus antara lain yaitu sebagai berikut :

##### **a. Kematian**

kematian disini yang dimaksud adalah meninggalnya salah satu suami atau istri tersebut atau kedua-duanya.

b. Perceraian

Selama perkawinan masih bertahan maka tidak akan timbul masalah. Akan tetapi dalam rumah tangga atau dalam suatu perkawinan tidak jarang terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan yang antara lain disebabkan karena perceraian. Apabila diantara suami istri selalu bertengkar dan keduanya sudah tidak dapat mencari kata sepakat secara objektif/ masing-masing mencari benarnya sendiri dan keduanya sudah tidak ada rasa saling pengertian sehingga mengakibatkan pertentangan yang semakin tajam disertai pertengkaran, maka situasi seperti ini sangat tidak baik karena selain mempengaruhi kerukunan suami istri itu juga berpengaruh pada anak-anak mereka karena bisa merusak pertumbuhan secara mental dan emosional. Sehingga apabila sudah tidak ada kata sepakat untuk berdamai maka satu-satunya jalan yaitu bercerai. Walaupun perceraian disini diperbolehkan tetapi tidak disukai Allah S.W.T.

c. Atas keputusan pengadilan.

Disini adanya gugatan cerai ke pengadilan agama dari salah satu pihak baik pihak suami ataupun pihak istri dikarenakan sudah tidak adanya kesesuaian lagi dalam rumah tangga.

## **G. Pengertian, Prosedur dan Macam-macam Talak**

Perkataan Talak berasal dari Thallaqa, yang berarti melepaskan. Menthalaq istri berarti melepaskan istri dari ikatan perkawinan, atau menceraikan istri.

Perceraian dalam arti umum yang dibedakan atas Talak dan Fasakh, dalam bahasa arab disebut furqah, berarti putusnya ikatan perkawinan. Fasakh itu sendiri artinya adalah memutuskan suatu perkawinan karena suami sakit gila, sakit kusta, sakit sopak/ balak, suami punya penyakit yang tidak dapat melakukan hasrat kelamin spt potong kemaluannya atau suami hilang tidak tentu hidup matinya dan sudah ditunggu 4 tahun lamanya. Karena itu tidak semua perceraian itu Talak, tetapi Talak itu sebagian dari pada perceraian. Perkataan talak mengandung dua arti yaitu :

- a. Dalam arti umum, yaitu setiap perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak suami kepada istrinya baik dengan kata yang jelas maupun dengan kata-kata sindiran (kinayah).
- b. Dalam arti sempit, berarti perceraian yang timbul karena kata-kata talak dan seumpamanya yang diucapkan suami secara jelas atau secara sindiran yang maksudnya melepaskan atau membebaskan istrinya dari ikatan perkawinan.

Dalam tesis ini penulis hanya akan membicarakan talak dalam arti sempit, karena talak inilah yang benar-benar harus digunakan sebagai jalan terakhir yang hanya bisa dilalui apabila jalan-jalan lain tidak bisa ditempuh lagi.

Sudah menjadi ketentuan bahwa talak itu adalah hak laki-laki atau suami dan hanya ia saja yang boleh mentalak istrinya, karena laki-laki atau suamilah

yang dibebani kewajiban perbelanjaan rumah tangga, nafkah istri, anak-anak, dan kewajiban lainnya. Yang dimaksud kewajiban lain disini adalah kewajiban-kewajiban yang kemudian dibebankan kepada suami apabila ia telah menjatuhkan talak kepada istrinya.

Seorang suami yang akan mentalak istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat termohon. Dalam permohonan tersebut dimuat identitas para pihak, yaitu pemohon (suami) dan termohon (istri) yang meliputi : nama, umur, dan tempat kediaman serta alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Pemeriksaan permohonan tersebut dilakukan majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama.

Dalam pemeriksaan permohonan yang dilakukan dalam sidang tertutup hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam sidang perdamaian tersebut para pihak (suami istri) harus datang secara pribadi. Selama permohonan belum ditetapkan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan lagi permohonan baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh pemohon sebelum perdamaian tercapai.

Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan agama menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Terhadap penetapan tersebut istri dapat mengajukan banding.

Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang. Dalam sidang tersebut suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.

Dalam hal istri telah mendapatkan panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa haadirnya istri atau wakilnya.

Jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Setelah ikrar talak diucapkan, maka hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Panitera pengadilan agama atau pejabat pengadilan agama yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai penetapan tersebut tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon untuk mendaftarkan penetapan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai

penetapan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan dilaksanakan dan oleh pegawai pencatat nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

Selain kewajiban sebagaimana tersebut diatas, maka panitera berkewajiban pula memerikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak (suami istri) selambat-lambatnya 7 hari sejak penetapan tersebut diberitahukan kepada para pihak (suami istri).

### Macam Talak

Talak bukanlah suatu hal yang digemari syariat Islam. Karena tujuan perkawinan bukan untuk bercerai., tetapi untuk membentuk keluarga bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun demikian apabila kehidupan suami istri dalam suatu perkawinan sudah demikian rupa, Islam membukakan pintu keluarnya dengan membolehkan cerai agar masing-masing dapat membentuk hidup baru dalam suasana yang lebih baik dan harmonis.<sup>18</sup>

Apabila talak sudah tidak dapat dielakkan lagi, Islam menganjurkan agar suami menjatuhkan talak dalam bentuk-bentuk seperti dibawah ini :

#### 1. Talak sunni :

Ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, yang keadaan suci itu suami istri tidak mengadakan hubungan kelamin (bersetubuh).

<sup>18</sup> Muttaqin, H. Z., Drs, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), 2004, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I., Jakarta, hal 41

## 2. Talak Bid'i

Ialah Talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, yang keadaan suci itu suami istri telah mengadakan hubungan kelamin (bersetubuh).

talak sunni maupun talak bid'i kedua-duanya sah menurut hukum Islam.

Khusus talak bid'i, suami yang menjatuhkan talak tersebut telah berdosa kepada Allah S.W.T. karena talak bid'i adalah haram hukumnya.

Baik Talak Sunni maupun Talak Bid'i kedua-duanya adalah sah menurut hukum.

Hanya mengenai Talak Bid'i, suami yang menjatuhkan talak tersebut telah berdosa kepada Allah S.W.T. karena Talak Bid'i adalah haram hukumnya.

Talak bukanlah suatu hal yang digemari syariat Islam. Karena tujuan perkawinan bukanlah untuk bercerai, tetapi untuk membentuk keluarga bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### Bentuk-bentuk Talak

Ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk kembali istrinya sesudah menjatuhkan Talak., maka bentuk Talak ada tiga yaitu : Talak raj'i, Talak bain sughra, dan bain kubra.

#### 1. Talak Raj'i

Ialah Talak satu atau Talak dua tanpa iwadhi (penebus Talak) yang dibayar istri kepada suami yang dalam masa iddah suami dapat merujuk kembali (tanpa akad) kepada istrinya.

#### 2. Talak Bain Sugra



Ialah Talak satu atau Talak dua (baik dijatuhkan sekaligus, maupun berturut-turut) disertai dengan iwadh dari istri kepada suami yang dengan akad nikah baru suami dapat kembali kepada bekas istrinya.

### 3. Talak Bain Kubra

Ialah Talak tiga (dilakukan sekaligus atau berturut-turut) suami tidak dapat memperistrikan lagi bekas istrinya kecuali bekas istrinya tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai setelah mengadakan hubungan kelamin dan habis masa iddahnyanya.

Selain yang tersebut diatas, mengenai Talak cerai adalah bentuk-bentuk lain sebagai berikut :

1. Kematian salah seorang di antara suami istri
2. Khulu' (semacam tebus talak) disertai tebus iwadh dari istri kepada suami atas persetujuan bersama.
3. Fasakh karena suami atau istri tidak dapat berfungsi sebagai suami atau istri yang baik.
4. Shiqaq karena percekakan terus menerus tidak berkesudahan . dapat diselesaikan melalui dua orang hakim dari pihak masing-masing, atau melalui proses pengadilan agama.
5. Li'an karena tuduhan berzina dari suami (yang tidak dapat mengajukan empat orang saksi) sehubungan dengan status hukum yang diragukan terhadap anak atau kandungan istri melalui proses pengadilan agama.

## 6. Akibat pelanggaran ta'lik Talak.<sup>19</sup>

Menurut syari'at Islam alasan yang dapat dibenarkan bagi seorang suami untuk menjatuhkan talak ialah :

1. Istri berzina atau
2. Istri nusyuz meskipun telah dinasihati berulang kali atau
3. Istri pemabuk, penjudi atau melakukan kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman dan kerukunan rumah tangga.

## H. Syarat terjadinya rujuk

Suami boleh melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang telah dijatuhi Talak satu atau Talak dua dengan tiada perlu melakukan perkawinan yang baru. Rujuk dapat dilakukan dengan syarat –syarat sebagai berikut :

- a. Bekas istri sudah dicampuri, sebab itu bekas istri yang belum dicampuri tidak boleh dirujuki, karena ia tidak beridrah sama sekali.
- b. Talak yang dijatuhkan tiada disertai dengan 'iwadl dari pihak istri, sebab itu istri yang ditalak dengan disertai 'iwadl dari pihak istri, tidak boleh dirujuki.
- c. Rujuk itu dilakukan waktu bekas istri masih dalam iddah. Kalau bekas istri telah habis waktu idahnya, tidak boleh dirujuk lagi.

---

<sup>19</sup> Muttaqien H.Z., Ibid, hal 42

- d. Rujuk itu dilakukan dengan diikrarkan dengan lisan, seperti kata suami : “Aku kembalikan engkau padaku” atau “aku rujuk kepada engkau”. Sebelum bekas suami mengikrarkan dengan lisan, maka ia tidak boleh mencampuri bekas istrinya.

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

Untuk membuat suatu tulisan diperlukan adanya penelitian-penelitian pendahuluan dan agar tulisan itu dikategorikan sebagai tulisan ilmiah maka dipakailah suatu metodologi-metodologi penelitian yang merupakan suatu rangkaian mulai dari pengumpulan data yang akurat, metodologi pendekatan yang dipergunakan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penyajian data, dan metode analisa data. Selain itu dalam membuat penelitian ilmiah seorang peneliti juga dituntut untuk memahami tentang dasar-dasar yang dijadikan tumpuan berpikir secara metodologis. Minimal peneliti perlu menyadari arti pentingnya kebenaran ilmiah, sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ilmiah, mengetahui cara yang berpikir yang cermat dan sistematis, mengetahui kebiasaan akademis dalam menentukan pola penelitian. Hal ini diperlukan agar hasil yang dicapai dalam pembuatan karya ilmiah ini dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah yang berbobot.

Dalam suatu penelitian peranan metodologi sangat penting sekali, karena di dalam pengembangan ilmu pengetahuan mempunyai peranan sebagai berikut yaitu :

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara baik dan lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.

3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan pengetahuan mengenai masyarakat.<sup>20</sup>

Metode penelitian ilmiah adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Tujuannya adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang akan didapat dari suatu penelitian dapat mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya.

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten yang berarti sesuai dengan cara tertentu berdasarkan suatu sistem dan tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Menurut konsep LIPI, penelitian diartikan sebagai berikut : Penelitian dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan adalah segala aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa dan menyatakan fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menggapai hal-hal tersebut.<sup>21</sup>

Penelitian pada umumnya bertujuan menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh

---

<sup>20</sup> Soejono Soetarto, SH, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia Cetakan ke 2, hal 7

<sup>21</sup> Koentjoroningrat, MA, Dr, 1977, Dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat, enerbit Gramedia, Jakarta, hal 6

suatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.

Untuk membuat Tesis ini maka penulis akan menggunakan Metodologi Penelitian yang akan diuraikan di bawah ini yaitu :

#### **A. Metode Pendekatan**

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan guna mencapai pengetahuan yang mempunyai kebenaran-kebenaran yang bisa dipertanggung jawabkan serta mempunyai ilmu derajat yang tinggi, untuk mencapai semua ini maka diperlukan suatu metode ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis akan menerapkan metode pendekatan secara Yuridis Sosiologis, Metode ini tidak meninjau Undang-Undang dari segi penyusunannya, tetapi yang ditelaah adalah pengertian dasar dari sistem hukum yang dapat diterapkan sesuai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Maksud dari pengertian dari yuridis disini adalah bahwa didalam mengadakan kegiatan penelitian serta pendekatan oleh penulis akan digunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum untuk meninjau dan melihat serta menganalisa masalah.

Sedang pengertian secara sosiologis adalah pendekatan secara langsung yang penulis lakukan pada beberapa lembaga yang bergerak dalam menangani masyarakat yang berhubungan dengan objek penelitian.

Dengan demikian yang dimaksud pendekatan secara yuridis sosiologis adalah bahwa selain mempergunakan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum didalam meninjau dan melihat serta menganalisa objek penelitian, penulis juga akan mengadakan pendekatan langsung kepada masyarakat dan responden, sehingga akhirnya mendapatkan hasil yang konkrit.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan eksistensi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menangani perkawinan menurut hukum islam setelah berlaku Undang-Undang no 1 tahun 1974 di Kota Semarang.

Pada type penelitian deskriptif diusahakan untuk memberikan uraian secara deskriptif atau penggambaran mengenai perkawinan menurut hukum Islam. Di samping itu penulis mempergunakan bahan-bahan dari hasil hasil kepustakaan serta untuk menunjang keberhasilan tesis ini digunakan juga wawancara dengan Penasihat Perkawinan baik di BP4 kota Semarang maupun BP4 di Kecamatan Semarang Barat.

### **C. Populasi**

Populasi yang penulis survey dalam tesis ini adalah :

- a. BP4 Kandepag Kota Semarang
- b. BP4 Kecamatan Semarang Barat

### **D. Metode Penarikan Sampel**

Di dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan teknik penarikan purposive sampling, yaitu dalam memilih subjek sampelnya diambil anggota sampel, sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya.

Purposive sampling atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah anggota team penasihat BP4 Kandepag Kota Semarang dan anggota team penasihat BP4 di Kecamatan Semarang Barat.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan hasil yang benar-benar dipertanggung jawabkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan di dalam suatu penelitian maka metode pengumpulan data sangatlah penting kedudukannya. Adapun pengumpulan data yang penulis pakai dalam penyusunan tesis ini dengan 2 metode, yaitu :



a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata. Cara memperoleh data dilakukan dengan wawancara dimana wawancara dilakukan dengan pejabat yang sah guna memperoleh data untuk tersusunnya Tesis ini.

Interview atau wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penyelidikan.<sup>22</sup>

Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara secara langsung, dengan berpedoman pada suatu daftar pertanyaan berstruktur yang bersifat terbuka sedangkan sebagai respondennya atau pihak yang diwawancarai adalah pihak-pihak tertentu yang penulis nilai dapat memberikan keterangan atau data yang penulis butuhkan, antara lain wawancara dengan :

- BP4 Kecamatan Semarang Barat : 2 orang
- BP4 Kantor Departemen Agama Kota Semarang : 2 orang

b. Data Sekunder

Studi kepustakaan ini dipergunakan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dengan mengambil bahan-bahan dari kepustakaan,

---

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, 1989, *Metodologi Research Jilid 2*, Andi Offset, Yogyakarta, hal 193

Perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan-keputusan pengadilan yang erat hubungannya dengan pengambilan judul dari Tesis ini.

Adapun kepustakaan tersebut berupa :

- Peraturan perundang-undangan
- Karya ilmiah para sarjana
- Literatur-literatur yang lain

#### **F. Metode Penyajian Data**

Dari data-data yang diperoleh yang mencakup data yang merupakan data primer dan data sekunder perlu diproses lagi untuk dapat disajikan dengan baik dan dijamin kebenarannya.

Untuk penyajian data ini sebelumnya harus diperiksa dan diteliti. Data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan sehingga dengan pembetulan data-data yang keliru, menambah data-data yang kurang dan melengkapi data-data yang lengkap sehingga akan didapat hasil penelitian yang memadai. Kemudian penulis akan sajikan dalam penulisan tesis secara rinci dan sistematis.

#### **G. Metode Analisa Data**

Di dalam metode analisa data ini, berisi penjelasan yang berdasarkan teori terhadap hasil penelitian yang diperoleh. Adapun dalam kegiatan analisa data, menggunakan metode analisa kualitatif yaitu menganalisa suatu hasil penelitian

yang berupa data-data dari lapangan. Dari data yang sudah dianalisa tersebut kemudian disajikan atau dilaporkan dalam bentuk penulisan tesis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Eksistensi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menangani perkawinan menurut hukum islam setelah berlakunya Undang-Undang no 1 Tahun 1974**

Sudah menjadi naluri manusia untuk mengikat tali perkawinan membentuk keluarga. sebagaimana dirumuskan dalam Undang- Undang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari batasan perkawinan tersebut maka jelaslah bahwa keinginan bangsa dan negara Republik Indonesia yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang bahagia artinya tidak mengalami penderitaan lahir bathin. Demikian pula bahwa setiap perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal artinya tidak mengalami perceraian.

Namun dalam prakteknya ternyata banyak permasalahan yang terjadi antara suami istri, baik itu sengketa dari dalam keluarga itu sendiri, misalkan mengenai nafkah, harta, anak maupun dari luar seperti suami/istri simpanan sampai keluarga yang menimbulkan terjadinya pertengkaran tersebut sehingga tidak jarang terjadinya perceraian. Selain itu kurang dewasanya usia perkawinan juga mempengaruhi angka perceraian yang tinggi dikarenakan kurang matang dalam berpikir.

**UPT-PUSTAK-UNGIP**

Untuk mencegah agar tidak terjadi masalah-masalah tersebut diatas maka diperlukan suatu lembaga yang bisa menengahi permasalahan keluarga itu agar bisa kembali rukun seperti semula.

Atas dasar pemikiran tersebut diatas maka penulis menganggap pentingnya menyusun dalam tesis ini tentang suatu lembaga yang mutlak diperlukan sebagai wadah yang mampu menampung aspirasi masyarakat yang diberi nama BP4.

Mengenai landasan hukum dari berdirinya BP4 adalah Permenag Nomor 85 tahun 1961 tentang pembentukan Badan Penasihat junto Permenag Nomor 30 tahun 1977. Pada awal mula berdirinya BP4 berasal dari singkatan Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian namun dalam perkembangan zaman BP4 berubah menjadi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dimana mempunyai tujuan yang sama yaitu mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran agama islam, sekarang dikenal dengan istilah keluarga sakinah.

Dalam menunjang program itu maka diperlukan bimbingan yang terus menerus dari korps penasihat yang mempunyai ketinggian akhlak sehingga mampu melaksanakan tugas pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Institusi perkawinan itu juga ditujukan untuk pemurnian dan pengembangan peradapan cinta kasih antara suami istri bukanlah berdasarkan kepada cinta yang mendetail akan tetapi untuk hubungan selama hayat, sambung

menyambung dengan cinta kasih orang tua kepada anak-anak dan seluruh keturunan yang merupakan buah perkawinan.<sup>23</sup>

Untuk mencapai tujuan dari perkawinan perlu organisasi yang baik dan teratur serta dipimpin oleh pengurus dan korp Penasihat yang mempunyai ketinggian akhlak dan budi nurani yang bersih.

Agar tercipta keluarga yang harmonis maka diperlukan adanya saling pengertian dan tenggang rasa antara suami istri. Dalam menciptakan keluarga yang harmonis ini peranan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sangat penting, dimana BP4 berperan dalam hal memberi penasihat pada keluarga yang sedang menghadapi suatu masalah atau problem yang melanda kegoncangan dalam rumah tangganya. Dalam hal ini penulis membatasi eksistensi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di kota Semarang.

Eksistensi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestaian Perkawinan (BP4) dalam menangani Perkawinan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di kota Semarang adalah mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga sakinah.

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 tentang "Pembinaan Keluarga Sakinah", Dalam BAB III Pasal 3 disebutkan Pengertian Keluarga Sakinah. Keluarga sakinah adalah

---

<sup>23</sup> Tarmidzi, Dr, 1977, Marriage Counseling, Dalam Nasihat Perkawinan dan Keluarga, Nomor 6 tahun VI BP4 Pusat Jakarta, hal 26

keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.<sup>24</sup>

Dengan pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah diharapkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat dapat berjalan baik sehingga nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dapat tertanam dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan mengembangkan aspek keluhuran akhlak dan moral masyarakat Indonesia akan lebih menghargai kebenaran, kebaikan dan keadilan. Tingkat kemiskinan masyarakat dapat kita tekan melalui penguatan institusi keluarga dan masyarakat, sehingga mobilisasi sumber daya masyarakat dapat ditingkatkan, dan masyarakat mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi. Ketahanan keluarga akan terus meningkatkan sehingga tidak mudah terpengaruh oleh dampak negatif budaya asing yang merusak tatanan kehidupan rumah tangga.. Sehingga dengan demikian kehidupan berumah tangga dapat berjalan dengan baik.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengutip beberapa Pasal dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga BP4. Dalam Anggaran Dasar Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pasal 4 disebutkan mengenai tujuan BP4 yaitu mempertinggi mutu perkawinan dan

---

<sup>24</sup> Sya'roni Ismail, H.M.,Dr, ibid hal 46

mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera menurut ajaran islam. Lebih lanjut dalam Pasal 5 Anggaran Dasar BP4 disebutkan :

BP4 mempunyai usaha-usaha yang merupakan tugas dan fungsi, sebagai berikut :

1. Memberikan nasihat dan penerangan tentang nikah, talak, cerai dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok.
2. Mengurangi terjadinya perceraian sewenang-wenang dan poligami yang tidak bertanggung jawab.
3. Memberikan bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan, problem keluarga, dan perselisihan rumah tangga.
4. Menerbitkan majalah, buku, brosur dan menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar dan sebagainya.
5. Bekerjasama dengan instansi, lembaga yang bersamaan tujuannya di dalam dan di luar negeri.
6. Memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka memasyarakatkan Undang-Undang Perkawinan.
7. Ikut berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral, yang bertujuan membina keluarga sehat, bahagia dan sejahtera.
8. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran islam dalam rangka membina keluarga bahagia sejahtera.
9. Meningkatkan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4) dalam keluarga.



10. Lain-lain usaha yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 6 Anggaran Dasar BP4 menyebutkan mengenai susunan organisasi dari BP4 yaitu :

1. Organisasi ini disusun sesuai dengan susunan pemerintah dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kotamadya sampai dengan kecamatan.
2. Organisasi ditingkat Pusat sampai Kecamatan mempunyai bagian-bagian :
  - a. Bagian pembinaan organisasi.
  - b. Bagian penasihat Perkawinan dan konsultasi keluarga.
  - c. Bagian pendidikan dan penerangan.
  - d. Bagian kerjasama lalu lintas.
  - e. Bagian penelitian dan pengembangan.

Sedangkan mengenai keuangan disebutkan dalam Pasal 10 Anggaran Dasar BP4 yaitu keuangan atau dana organisasi diperoleh dari :

- a. Bantuan Pemerintah.
- b. Donasi dan bantuan masyarakat.
- c. Usaha-usaha lain yang sah dan halal.

Mengenai korp penasihat perkawinan dijelaskan pula dalam Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Korp Penasihat Perkawinan yaitu :

- (1) Korp Penasihat Perkawinan diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus masing-masing tingkatan organisasi.
- (2) Korp Penasihat Perkawinan harus :

- a. Berkelakuan baik dan beramal sholeh, terutama dalam kehidupan berkeluarga.
  - b. Menyimpan rahasia orang yang berkepentingan.
  - c. Sudah mendapat latihan dalam penasihat.
- (3) Korps Penasihat Perkawinan yang tidak memenuhi kriteria tersebut pada ayat (2) Pasal ini diberhentikan sebagai penasihat.

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai korps penasihat Perkawinan memberikan penjelasan kepada keluarga (rumah tangga) yang sedang dilanda kegoncangan yang mengarah ke perceraian, dengan berusaha untuk mendamaikan dan memberikan penasihat yang sekiranya perceraian tidak perlu terjadi dalam keluarga (rumah tangga) tersebut.

BP4 selain memberikan penasihat perkawinan kepada keluarga yang menjurus ke perceraian, juga memberikan penasihat pra nikah kepada calon pengantin, dimana penasihat diberikan oleh BP4 tingkat kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal mempelai wanita.

Biasanya penasihat kepada calon pengantin diberikan di balai nikah dimana balai tersebut dipergunakan sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tidak sedikit pula pihak orang tua calon mempelai menghendaki agar pemberian nasihat itu dilakukan di rumah mereka.

Pemberian nasihat dan penjelasan-penjelasan tentang perkawinan kepada calon mempelai biasanya dapat berjalan dengan lancar. Nasihat yang diberikan dengan mudah dapat diterima oleh masing-masing mempelai. Ini dapat dimaklumi karena mereka dalam keadaan bahagia dan senang. Tapi ada juga yang sulit

menerima nasihat, bila perkawinan itu dalam keadaan terpaksa atau harus dilakukan karena harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang terlanjur mereka lakukan sebelumnya. Bahkan beberapa yang diberikan penasihat perkawinan, sama sekali tidak mau menerima dan mendengar nasihat.

Bentuk-bentuk penasihat atau bimbingan perkawinan banyak tergantung kepada tujuan atau nasihat yang diinginkan oleh klien atau orang yang dinasihat. Karena masalah yang dihadapi orang yang dinasihat tidak selalu sama bahkan tiap individu mempunyai persoalan sendiri., maka diperlukan pendekatan yang berbeda satu dengan yang lain. Bentuk-bentuk penasihat yang lazim dilakukan BP4 adalah sebagai berikut :

1. Wawancara atau dialog khusus.

Jika yang dinasihat atau klien yang minta nasihat seorang diri atau satu pasang calon pengantin maka bentuk penasihat yang baik adalah wawancara atau dialog secara tatap muka. Wawancara semacam ini dilakukan ditempat tertutup yang khusus disediakan untuk itu. Bobot wawancara tergantung pada masalah yang diajukan. Ada masalah yang rumit ada pula yang sederhana saja. Tetapi sering klien sulit mengemukakannya. Bahkan tidak jarang yang bersangkutan menyembunyikan hal-hal tertentu. Untuk itu maka penasihat harus berusaha dengan menggali pertanyaan-pertanyaan yang sistematis agar permasalahan lebih terbuka. Dewasa ini fungsi penasihat semacam ini sudah berkembang menjadi pusat informasi. Banyak perorangan atau pasangan calon pengantin ke klinik penasihat hanya untuk

mendapatkan kan informasi atau tambahan pengetahuan tentang seluk beluk perkawinan atau Undang-undang perkawinan sehingga segi penasihatannya menjadi kurang. Klien yang semacam ini biasanya tidak membawa problem yang harus dipecahkan. Sebaliknya terdapat pula klien mempunyai permasalahan khusus yang perlu mendapat pengamatan lebih lanjut dari penasihat. Termasuk dalam kategori ini remaja usia kawin yang mempunyai problem khusus. Bentuk dialog khusus ini yang sangat lazim dipergunakan karena dapat menggali permasalahan secara lebih mendalam dan bersifat rahasia.

## 2. Wawancara atau dialog umum.

Banyak perorangan atau pasangan muda mudi datang ke klinik untuk meminta informasi tentang seluk beluk perkawinan. Permintaan informasi semacam ini tidak ada kaitannya dengan masalah khusus yang harus dipecahkan karena klien tidak punya problem yang diatasi tapi klien klien minta nasihat untuk menambah pengetahuan mereka untuk persiapan memasuki jenjang perkawinan yang ditempuhnya. Penasihatannya semacam ini dapat dilakukan secara bersama-sama di tempat tertentu dengan metodeceramah dan tanya jawab serta jika perlu dengan latihan misalkan upacara ijab kabul pernikahan. Sejak dilaksanakannya Undang-undang perkawinan, dengan memanfaatkan waktu senggang 10 hari sebelum akad nikah beberapa KUA bekerjasama dengan BP4 melaksanakan kursus perkawinan 10 hari dengan mengumpulkan beberapa pasang calon pengantin yang telah

mendaftarkan hendak nikah di KUA. Kursus semacam ini ternyata sangat menolong pasangan-pasangan pengantin baru untuk memelihara kerukunan diantara pasangan tersebut serta menambah wawasan mereka untuk mengendalikan rumah tangganya.

### 3. Kunjungan Rumah.

Disini penasihat datang ke rumah klien yang bersangkutan. Dalam hal ini biasanya penasihat merasa perlu juga untuk memberikan penasihatannya kepada keluarganya. Penasihatannya atau bimbingan semacam ini melahirkan bentuk kunjungan rumah. Sekarang kunjungan rumah menjadi metode yang efektif untuk memberikan secara motivatif tanpa melihat ada atau tidak kasusnya. Dengan kunjungan rumah tersebut maka banyak pesan yang bisa disampaikan oleh penasihat untuk memotivasi tujuan rumah tangga bahagia sejahtera. Disini dipakai metode silaturahmi dengan dialog secara santai dan diiringi pemberian bingkisan buku-buku atau bentuk lainnya.

BP4 dalam hal ini tidak hanya memberikan penasihatannya perkawinan saja tetapi juga melakukan serangkaian kegiatan yaitu mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari sebab-sebab konflik tersebut seperti bagaimana issue-nya, faktor-faktor yang telah menimbulkannya, sebab-sebab yang lebih mendalam, tingkatan dari kegawatan konflik, caranya mereka berselisih, posisi dan tuntutan setiap pihak, keinginan-keinginan dan kejengkelan dari masing-masing pasangan, apakah pada mereka masih ada hasrat untuk melanjutkan perkawinan mereka,

apakah diantara mereka sebenarnya masih ada rasa saling cinta yang untuk sementara waktu terdesak karena emosi dan amarah. Ataukah antara mereka sudah tumbuh rasa benci yang mendalam, sampai dimana antara mereka terdapat keinginan untuk bersatu lagi atau tidak. Usaha mendapatkan keterangan – keterangan dan gambaran yang jelas ini dilakukan dengan menyelenggarakan wawancara dengan mereka satu persatu lalu kemudian dengan mereka berdua secara bersama.

Diusahakan pula untuk mengetahui apa yang selama ini oleh suami dan istrinya itu telah dilakukan untuk menyelesaikan perselisihannya, dan mengapa mereka gagal.

Dari banyak data yang diperoleh maka penasihat sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi, kondisi, dan posisi suami istri tentang apa apa yang merupakan masukan yang baik, yang dapat menguntungkan dan hal-hal negatif yang merupakan hambatan dalam usaha-usaha penyelesaian, maka sang penasihat menyusun program kerja selanjutnya.

Kemudian diselenggarakan lagi pertemuan dan wawancara, bilamana mungkin langsung saja dengan mereka berdua. Kepada mereka dijelaskan bahwa persoalan mereka tidak hanya sesuatu yang diangan-angan saja dapat diselesaikan tetapi persengketaan diantara mereka dapat diselesaikan. Untuk selanjutnya ditanyakan kepada mereka apakah benar-benar masih saling mencintai satu sama lain atau sekurang-kurangnya masih tetap menginginkan perkawinan mereka terselamatkan.

Petugas BP4 juga harus memberikan penegasan mengenai ruginya dan bahayanya bilamana mereka sampai putus asa dan menjadikan hubungan mereka putus. Selesai memberikan penjelasan dan mengetuk hati mereka kesemuanya itu harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan menunjukkan perhatian, simpati, dan minat yang besar terhadap suami istri yang bermasalah tersebut. Kepada mereka juga diterangkan jalan apa yang harus ditempuh oleh mereka dengan dibantu oleh penasihat. Bila mereka masih memerlukan berpikir dan barangkali juga ingin berunding antara mereka sendiri, maka pertemuan ditunda. Bila suami istri tersebut memang telah berniat bulat hendak hidup rukun lagi maka penasihat secara detail melanjutkan keterangan mengenai program kerja untuk memperbaiki perkawinan mereka.

Kepada suami istri yang sedang ditimpa masalah tersebut juga diterangkan juga bahwa perselisihan mereka itu adalah suatu persoalan biasa yang biasa terjadi antara manusia dan antara suami istri. Jadi cara mengatasi masalah tersebut bukanlah suatu yang terlalu sulit untuk dipikirkan dan disusun, karena mereka :

- a. sedang dilanda emosi, sehingga tidak mampu lagi mempergunakan akal sehat, antara lain tidak dapat lagi berbicara lagi secara rahasia, bersikap secara adil dan bertindak secara objektif.
- b. Tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana menyelesaikan suatu persoalan.

- c. Mungkin juga mereka korban dari suatu pandangan hidup telah menjadikan mereka tidak mau berjuang, tidak berambisi dan lebih suka menyerah.
- d. Mungkin juga masih belum cukup dewasa secara emosional sehingga mereka bertengkar bagaikan anak-anak atau seperti orang-orang yang tidak pernah bersekolah.
- e. Atau mungkin juga tidak pernah berkomunikasi secara wajar, sehingga diantara mereka selalu terjadi salah paham atau tidak ada pengertian sama sekali.

Mulai sekarang semuanya harus berubah dan penasihat bersedia membantu mereka. Selanjutnya kepada mereka diberikan ilmu untuk menyelesaikan masalah secara praktis dan cara mempergunakannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Kepada mereka juga ditegaskan sifat-sifat dalam hubungan mereka yang secara mudah dapat menimbulkan masalah baru misalkan membicarakan kepada orang lain mengenai kejelekan dari pasangan mereka, karena itu harus selalu diingat dan sedapat mungkin dihindarkan. Kepada pasangan suami istri yang sedang bermasalah tersebut juga dianjurkan untuk sebanyak mungkin mencari hal-hal yang bersama mereka senangi dan dapat merekatkan lagi hubungan mereka.

Kalau diantara pasangan yang sedang bermasalah itu terdapat persoalan-persoalan yang selama ini menimbulkan kejengkelan pada salah satu pihak atau malah timbul pertengkaran padahal masalah yang dipersoalkan ternyata ringan



saja atau sama sekali bukan soal yang harus menjadi masalah hal demikian ini juga harus dijelaskan kepada suami istri yang sedang menghadapi persoalan tersebut. BP4 dalam hal ini sebagai penasihat perkawinan harus relaks dan sekali-sekali juga menggunakan sedikit humor sehingga para pihak yang sedang menghadapi persoalan tersebut bisa lebih santai dan tersenyum. Selain itu juga diajarkan pula soal komunikasi, soal membuat penyesuaian, soal kompromi dan tenggang rasa diantara mereka dalam bersikap. Dan juga diberikan penjelasan kepada mereka mengenai arti cinta sejati dimana bukan hanya saling memiliki, menguasai atau menikmati saja tetapi juga memberikan segala-galanya dan mau berkorban untuk pasangannya. Dalam menyampaikan penjelasan mengenai rencana yang akan dilaksanakan itu penasihat juga harus memperhatikan faktor psikologi mereka, kemampuan-kemampuan mental, faktor-faktor ekonomi dan lingkungan sosial mereka.

Setelah semuanya ini dijelaskan, dimengerti, diterima dan dijanjikan oleh mereka akan dilaksanakan maka mereka disuruh pulang dan dipersilahkan untuk melaksanakan program yang telah dibahas dan disetujui itu. Dan jika perlu mereka dapat bertemu dengan penasihat lagi untuk melaporkan kemajuan yang diperoleh. Petugas BP4 dalam hal ini juga harus mengecek perkembangan usaha dan hubungan mereka itu dan bila diperlukan bisa memberikan petunjuk-petunjuk lagi.

Permasalahan pertengkaran suami istri yang selama ini berhasil ditangani team penasihat perkawinan (BP4) adalah bila keduanya bertengkar adalah pertama tama istrinya dipanggil dulu untuk menyampaikan permasalahan yang

ada, kemudian suaminya juga dipanggil sendirian untuk mengungkapkan permasalahan menurut versi suami tersebut, selanjutnya keduanya dipanggil untuk menjadikan satu informasi yang ada, kalau hasilnya beda mereka diberi wejangan-wejangan agar tercapai islah atau ada titik temu, kalau keduanya mau introspeksi diri dan tidak jadi ingin cerai maka permasalahan tersebut dianggap telah selesai.<sup>25</sup>

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam hal memberikan penasihat kepada pasangan suami istri yang sedang dilanda masalah itu harus memakai dasar-dasar daripada penasihat perkawinan (the principles of marriage Counseling) yaitu :

1. Penasihat tidak hanya memberi nasihat tetapi juga harus memberikan pertolongan lebih lanjut berupa bimbingan dan bantuan yang nyata.<sup>26</sup>
2. Selain itu harus dijaga agar penyelesaian persengketaan itu tetap menjadi tanggung jawab dan wewenang para suami istri. Penasihat hanya membantu walau bantuan itu banyak dan mendalam sekali.
3. Harus diusahakan oleh penasihat agar suami dan istri yang ditolong ini selanjutnya mampu mengurus diri mereka sendiri, jangan sampai mereka selalu mengandalkan jasa-jasa dari penasihat perkawinan saja.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Saefuddin, S Ag, sebagai anggota Team Penasihat BP4 di Kecamatan Semarang Barat, tanggal 2 maret 2005

<sup>26</sup> Farida Ariani, Hj, Dra, 2001, Pedoman Konseling Keluarga Sakinah, Departemen Agama R.I. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek peningkatan Keluarga Sakinah, hal 151

Selanjutnya setelah suami istri telah memahami semua hal yang telah diberikan penasihat perkawinan maka kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong kearah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal.

Apabila semua lancar seperti apa yang diharapkan penasihat maka tercapai pulalah apa yang diharapkan Badan, Penasihat dan Pembinaan Perkawinan (BP4) di kota Semarang yaitu untuk mewujudkan program pembangunan nasional melalui pembinaan keluarga yaitu dengan memberikan sumbangan pikiran mengenai pokok-pokok persoalan yang penting diketahui dan cara penyelesaiannya kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya calon dan pasangan suami istri yang datang ke BP4, dimana program dan tujuan BP4 adalah upaya untuk membentuk keluarga sakinah.

**B. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menangani perkawinan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di kota Semarang.**

Beberapa macam kendala yang dihadapi oleh para penasihat perkawinan (BP4) dan cara-cara penyelesaiannya sebagai berikut :

1. Kendala dari suami istri itu sendiri.
  - a. Kendala pertama yang biasanya dihadapi oleh penasihat perkawinan adalah bahwa suami istri yang bersengketa itu benar-benar tidak cocok atau terlalu jauh berbeda dalam sejumlah perkara

yang sangat mendasar. Sebenarnya mereka tidak boleh kawin karena terlalu berbeda mengenai latar belakang pendidikan, temperamen, iman, pandangan hidup, minat dan lain-lain. Serta bila salah seorang dari mereka terlalu rendah tingkat pemikirannya serta kasar sifatnya, ada kemungkinan bahwa persengketaan mereka telah begitu parah, bahkan pertengkaran sudah menjadi kebiasaan atau cara hidup mereka. Jadi satu-satunya nasihat yang bisa dapat diberikan hanyalah lebih baik berpisah sementara, tetapi bilamana perceraian ini tidak mungkin atau sulit karena alasan-alasan lain maka mereka terpaksa dibiarkan melanjutkan hidup mereka dalam situasi konflik yang berkepanjangan.

- b. Penasihat perkawinan (BP4) akan kesulitan bila suami istri yang berselisih itu menderita gangguan mental, maka lebih dahulu atau bersama-sama mereka itu harus dibikin tenang, dimana hal ini tentunya tidak mudah. Atau bisa juga salah satu atau keduanya terlalu egoistis, tidak bertanggung jawab, banyak menuntut terlalu menggantungkan diri pada orang lain, selalu dalam ketakutan, bersifat suka atau mudah memusuhi atau menyerang orang lain, mudah tersinggung atau menunjukkan sifat kekanak-kanakan lainnya. Dimana gejala-gejala ini adalah bentuk daripada masih belum dewasanya orang tersebut secara emosional

- c. Suami atau istri atau kedua-duanya terlalu rendah tingkat kecerdasannya sehingga tidak dapat diajak untuk berusaha memecahkan kesulitan mereka.
- d. Suami istri tersebut punya latar belakang kawinnya bukan karena alasan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan konsepsi menginginkan perkawinan yang berhasil, misal karena hamil duluan. Sehingga tidak pernah berusaha untuk membina atau terjalin kerukunan.
- e. Kendala yang lain adalah salah satu suami atau istri tidak dapat menjalankan tugas dalam berhubungan sex dengan baik sehingga salah seorang dari mereka tidak mau menerima situasi ini walaupun sebetulnya bila mau diobati atau pergi ke dokter medis masalah ini dapat diatasi.
- f. Kendala suami istri itu semata-mata atau terutama karena persoalan ekonomi yang disebabkan oleh kondisi perekonomian saat ini.

## 2. Kendala dari penasihat perkawinan..

Kendala yang dihadapi penasihat dalam melaksanakan tugas yang begitu berat dan rumit adalah membuat kesalahan-kesalahan yang bersifat fundamental yaitu penasihat tidak atau kurang mengikuti cara penyelesaian yang dinamakan "problem solving", Misalkan penasihat mengambil kesimpulan tentang macam dan ukuran kesulitan yang sedang dialami suami istri yang meminta penasihatannya, dan mengambil kesimpulan mengenai sebab-sebab dari persengketaan itu anpa terlebih dulu

mengumpulkan data-data atau informasi secara lengkap dan teliti melalui wawancara yang dilakukan dengan menggunakan tehnik-tehnik wawancara yang telak disetujui dalam penasihatn praktis. Akibat kesalahan yang dibuat penasihat ini mungkin berakibat serius sehingga program penyelesaian yang direkomendasikan menjadi salah. Dalam mengidentifikasi sebab-sebab dari kesulitan atau konflik dalam mengambil kesimpulan mengenai nama, macam, sifat dan ukuran dari problem yang dialami para klien penasihat hanya pendapat pribadi atau subjektif dan tidak secara objektif atau terlepas dari pendapat pribadi yang berdasar perasaan semata. Pendapat pribadi biasanya telah melekat pada pikiran dan hati tetapi pendapat ini sebenarnya tidak lain dari suatu prasangka. Dalam usaha-usaha mencari sebab-sebab dari suatu perselisihan dan menetapkan macam dan sifat perselisihan itu seorang penasihat tidak boleh didorong oleh pendapat pribadi. Karena yang demikian itu melanggar prinsip dan cara "problem solving". Seorang penasiha harus mampu mencari dan mengembangkan beberapa alternative mengenai penyelesaian yang tepat dan praktis. Setiap kemungkinan itu ditelitinya dan semuanya itu dibanding-bandingkan, dicari mana yang paling besar kemungkinan berhasilnya bilamana hendak dilaksanakan. Kemudian dipilih satu yang dianggap terbaik. Hasil pilihan yang tebaik inilah yang bisa dijadikan program penyelesaian yang bisa diusulkan pada para klien yang bermasalah tersebut. Penasihat kurang rajin dan gigih dalam mengumpulkan informasi khususnya dalam mengidentifikasi posisi

masing-masing pihak dalam konflik. Penasihat kurang objektif dalam mengambil kesimpulan tentang posisi masing-masing. Dimana penasihat terlalu banyak mendengarkan satu pihak saja atau terlalu memihak pada salah satu pihak saja. Penasihat terlalu idealis atau terlalu banyak berbicara berupa ajaran-ajaran yang terlalu tinggi atau yang sebenarnya merupakan slogan-slogan atau ucapan-ucapan yang bersifat umum dan sudah terlalu sering didengar. Penasihat mengusulkan cara penyelesaian yang tidak diperiksa terlebih dulu secara sungguh-sungguh, apakah yang diusulkan itu mampu dilaksanakan oleh suami istri yang bersangkutan, mengingat kondisi-kondisi mereka. Penasihat menghadapi klien yang begitu sulit sehingga penasihat mengambil kesimpulan bahwa persoalan mereka itu tidak dapat diselesaikan lagi dan bubarnya perkawinan merupakan satu-satunya pemecahan, padahal bilamana peneliti lebih teliti, gigih dan lebih sabar sebenarnya kasus tersebut dapat selesai dengan baik tanpa suatu perceraian.

Seperti yang disampaikan penulis diatas penasihat mungkin membuat suatu kesalahan yang sangat mendasar yaitu seakan-akan penasihat mengambil alih tanggung jawab dan wewenang atas pengurus hubungan suami istri, padahal sesungguhnya seorang penasihat hanya membantu walaupun bantuan yang diberikan sangat dalam. Jadi harus dijaga dan diusahakan bahwa suami dan istri itu sendiri yang bisa menyelesaikan persengketaan antara suami istri tersebut. Dalam melaksanakan program penyelesaian ini seorang penasihat bila perlu membantu lagi bila diperlukan, tetapi dalam

hal ini yang penting adalah suami istri tersebut harus pandai menyelesaikan masalah mereka. Untuk itu diantara suami istri tersebut tidak boleh seumur hidup bergantung kepada seorang penasihat.

3. Suami istri yang bermasalah tersebut datang ke BP4 biasanya sudah mengambil keputusan untuk bercerai sehingga ketika datang ke penasihat dan diberikan penasihat perkawinan untuk didamaikan sudah tidak bisa. Mereka datang ke BP4 sebenarnya dengan tujuan hanya untuk meminta “surat ijin untuk bercerai” sebagai syarat untuk mengajukan perceraian di pengadilan agama terutama bagi pegawai negeri, Biasanya surat tersebut dibuat oleh Kantor Departemen Agama kota semarang, yang meminta adalah pasangan suami istri pegawai negri yang ingin cerai tersebut.<sup>27</sup>
4. Kendala Yang lain yaitu pihak ke 3 (tiga) ikut campur dalam persoalan suami istri. Dalam hal ini suami istri dalam posisi sedang bertengkar dan ada pihak ke 3 yang ikut masuk di dalamnya yaitu orang tua atau saudara yang berkaitan dengan adanya harta warisan, anak ataupun harta gono gini. Bahkan beberapa diantaranya menggugat lewat pengacara. Untuk menyelesaikan masalah ini biasanya penasihat perkawinan mengadakan sidang. Sidang pertama dihadiri istri dulu untuk mendengarkan masalahnya, kemudian sidang ke dua dengan menghadirkan suami untuk. Selanjutnya pada sidang ke tiga menghadirkan suami istri yang sedang bertengkar tersebut untuk dicarikan pemecahan bersama. Akan tetapi

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak H Agus M Natzir, SH, sebagai anggota Team Penasihan BP4 URAIS di Kandepag Kota Semarang pada tanggal 14 februari 2005



kalau keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi maka penasihat menyarankan untuk melanjutkan ke pengadilan.<sup>28</sup>

Beberapa kasus yang biasanya dihadapi petugas Badan Penasihat, pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di kota Semarang adalah sebagai berikut :<sup>29</sup>

1. Salah satu pihak berzina
2. Suami suka mabuk, pemadat
3. Suami suka berjudi
4. Salah satu pihak berselingkuh
5. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
6. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung
7. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat
8. Salah satu pihak mendapat cacat badan dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
9. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi
10. Salah satu pindah agama sehingga terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga
11. Tidak ada kecocokan lagi

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Moch Rodii sebagai anggota team penasihat BP4 Kecamatan Semarang Barat pada tanggal 10 maret 2005

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ibu Azizah, sebagai anggota team penasihat BP4 URAIS Kandepag Kota Semarang pada tanggal 24 februari 2005

12. Suami tidak memberi nafkah

13. Pisah ranjang lebih 40 hari

14. Tidak punya anak atau keturunan.

## BAB V

### PENUTUP

Dari yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka bersama ini akan penulis kemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran, terutama mengenai eksistensi Badan Perasihatan, Pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam menangani perkawinan menurut hukum islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di kota Semarang.

Dengan kemampuan dan waktu yang terbatas penulis berharap program dari BP4 dalam memasyarakatkan keluarga sakinah serta untuk memberikan bimbingan kepada calon keluarga muslim dapat tercapai sehingga dapat meningkatkan mutu dan nilai perkawinan menurut ajaran agama Islam. Selain itu penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi upaya pembinaan keluarga sakinah dan berfaedah bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

#### A. KESIMPULAN

1. Bahwasannya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kehidupan berkeluarga antara suami dan istri pasti menginginkan hidup bahagia untuk itu maka perlu dipupuk rasa saling mencintai, menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati dan harga menghargai.

Dimana dalam prakteknya ternyata banyak permasalahan yang terjadi antara suami istri, baik sengketa dalam rumah tangganya sendiri atau faktor yang mempengaruhi dari luar sehingga rawan terjadinya perceraian. Kurang dewasanya usia kawin juga juga berpengaruh pada angka perceraian yang tinggi. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diatas mutlak diperlukan suatu lembaga yang diberi nama BP4. Pada mula berdirinya BP4 bernama Badan Penasihat Perkawinan, Peselisihan dan Perceraian. Dengan perkembangan zaman maka lembaga tersebut sekarang bernama Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, dimana mempunyai tujuan yang sama yaitu mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga), sejahtera dan kekal menurut ajaran agama islam, sekarang dikenal dengan istilah keluarga sakinah. Dalam menunjang program diatas maka diperlukan bimbingan dari korp penasihat perkawinan yang mempunyai ketinggian akhlak sehingga mampu melaksanakan tugas yang dibebankan padanya. Selain itu untuk mencapai tujuan dari perkawinan diperlukan suatu organisasi yang baik dan teratur yang dipimpin oleh pengurus yang mempunyai ketinggian akhlak dan budi nurani yang bersih. BP4 sangat berperan penting dalam penasihatan perkawinan bagi keluarga yang sedang dilanda kegoncangan dalam rumah tangganya. Eksistensi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menangani perkawinan menurut hukum islam setelah berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah bertujuan membentuk keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-keimanan, ketakwaan dan akhlak yang mulia.

Dalam Undang-Undang Perkawinan didalamnya terkandung unsur tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu antara suami istri harus saling membantu, melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

BP4 mempunyai susunan organisasi dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kotamadya sampai tingkat Kecamatan dimana untuk menjalankan organisasi ini BP4 mempunyai dana yang diperoleh dari bantuan pemerintah, donasi dan bantuan dari masyarakat maupun usaha-usaha lain yang halal dan sah.

Dalam mendamaikan perselisihan antara suami/istri memerlukan nasihat kepada orang tua dari kedua belah pihak dan bila masih belum berhasil maka diperlukan pihak lain, yaitu dalam hal ini ke BP4 sebagai Korp Penasihat Perkawinan yang akan memberikan solusi dan nasihat terbaik sehingga perselisihan dapat didamaikan.

**UPT-PUSTAK-UNDIP**

Korp Penasihat BP4 dalam hal ini selalu siap sedia dalam menerima suami istri yang memerlukan Bimbingan/Nasihat/Konsultasi tentang Nikah, Thalak dan Rujuk juga memberikan penasihat perkawinan bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan (calon pengantin), perceraian dan membantu menyelesaikan perselisihan tentunya dengan kerjasama dari kedua belah pihak.

BP4 dalam memberikan Penasihat Perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan rumah tangga muslim yang bahagia, sejahtera, mengurangi perceraian, mencegah perceraian yang sewenang-wenang, serta mendamaikan perselisihan dengan menjaga kerahasiaan.

Bentuk-bentuk penasihat yang lazim dilakukan BP4 adalah dialog khusus, dialog umum serta kunjungan rumah, dimana metode ini dirasa paling tepat dan efektif untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berselisih.

BP4 dalam memberikan penasihat perkawinan juga melakukan kegiatan untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi apa yang dipersoalkan, apa yang telah dilakukan suami istri tersebut dalam menyelesaikan perselisihannya sehingga dalam hal ini BP4 dapat memperoleh gambaran keadaan yang ada, sehingga dengan wawancara atau pertemuan kembali BP4 dapat menggunakan metode yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah dengan dasar-dasar dari pada penasihat perkawinan, yaitu selalu memberikan nasihat juga pertolongan yang lebih lanjut berupa bimbingan dan bantuan yang nyata, juga menjaga agar penyelesaian

perselisihan tetap menjadi tanggung jawab suami istri tersebut walau bantuan yang diberikan penasihat banyak dan dalam sekali, selain itu juga mengusahakan agar suami istri itu untuk selanjutnya dapat mengurus diri mereka sendiri dengan baik.

Upaya untuk membina rumah tangga agar bahagia, sejahtera dan langgeng adalah dengan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu :cemburu yang berlebihan. Jika cemburu sebatas wajar bisa diartikan sebagai rasa cinta tetapi jika cemburu tanpa alasan yang jelas akan mengganggu rumah tangga, rasa iri, dengki maupun dendam. Rasa dendam yang tidak ada ujungnya adalah sikap yang tidak baik. Bila melihat kelebihan dan kebaikan orang hendaknya meniru bukan malah iri atau dengki, judi dan minuman keras. Dengan berjudi maka akan membuat keluarganya hancur karena tidak terurus. Biasanya penjudi lalai akan segala tugasnya baik kepada keluarga maupun Allah SWT, pergaulan bebas tanpa batas. Dalam hidup bermasyarakat memang dibutuhkan bergaul antar sesama masyarakat karena kita tidak bisa hidup sendiri. Tetapi bila pergaulan tanpa batas yang menyangkut pria dan wanita akan mengganggu kebahagiaan keluarga. Oleh karena itu segala bentuk zina harus di jauhi karena zina merupakan pekerjaan yang terkutuk dan tercela, Kurang bisa menjaga kehormatan diri. Sebagai sebuah keluarga hendaklah selalu mawas diri dan menjaga kehormatan baik itu tingkah laku, kata dan perbuatan dan hendaklah mencerminkan sikap pribadi seorang muslim.

Hal-hal yang menimbulkan perselisihan, seperti : mengurangi kenangan pribadi. Menceritakan kepada suami atau istri cerita lama berkenaan percintaan terdahulu merupakan perbuatan yang tidak bijaksana dan dapat menimbulkan perselisihan. Cerita masa lalu biarlah berlalu tidak perlu dikenang yang penting sekarang menjalani kehidupan baru dan berjuang bersama keluarga untuk mencapai kebahagiaan., mengungkit kekurangan keluarga suami atau istri. Keluarga merupakan belahan jiwa jadi tidak perlu untuk mengungkit kekurangan keluarga karena hal itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji, bahkan malah bisa menimbulkan perselisihan. Untuk itu sebisa mungkin untuk dihindari, suka mencela kekurangan suami istri. Suka mencela kekurangan suami/istri baik secara diam-diam maupun terang-terangan harus dihindarkan karena itu merupakan perbuatan yang tidak baik bisa menimbulkan perselisihan dengan akibat keharmonisan rumah tangga bisa terganggu. Apabila ada kekurangan salah satu pihak alangkah baiknya bila saling mengisi, dan memperbaiki karena manusia tidak ada yang sempurna. Sedikit maupun banyak pasti ada kekurangan jadi harus saling melengkapi, memuji pria atau wanita lain. Sesuatu yang tidak bijaksana bila memuji pria atau wanita lain dihadapan suami/istri karena dapat mengundang perselisihan. Alangkah bijaksananya bila mau memuji suami atau istri sendiri karena akan menambah keharmonisan keluarga tersebut, kurang peka terhadap hal-hal yang tidak disenangi suami/istri. Masing-masing pihak baik suami atau istri harus peka dan tanggap terhadap segala sesuatu yang dapat



menimbulkan rasa tidak senang pada diri masing-masing. Tidak berkata yang bisa melukai perasaan masing-masing pihak dan senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan tempat agar suasana selalu menyenangkan.

2. Kendala-kendala yang biasa dihadapi oleh para penasihat perkawinan (BP4) adalah :

Kendala dari suami istri itu sendiri karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Untuk penyelesaiannya adalah kedua suami istri tersebut harus saling menyadari dan memahami kekurangan diri mereka masing-masing juga instropeksi. Selalu berpikir bahwa setiap permasalahan ada jalan keluarnya, berusaha terbuka dalam segala hal sehingga masing-masing bisa saling mengerti, dan apabila pertengkaran tidak dapat dihindari mencari penengah yang netral dan bisa memberi solusi terbaik bagi suami istri yang menghadapi masalah tersebut.

Kendala dari penasihat perkawinan itu sendiri karena menyimpulkan masalah berdasarkan pendapat pribadi, kurang trampil dalam menggali informasi sehingga dalam memberikan bantuan penyelesaian kasus hasilnya tidak maksimal, selain itu penasihat juga kadang berpihak pada salah satu klien, banyak bicara, serta gampang putus asa dalam menyelesaikan kasus yang sulit. Untuk penyelesaiannya adalah konselor bila mengalami kesulitan ia dapat berkonsultasi atau bertukar pikiran dengan penasihat lain, juga berusaha merubah pendekatan dalam memberikan konseling. Selain itu penasihat harus selalu meningkatkan

wawasannya dengan membaca literatur-literatur yang ada sehingga mempunyai banyak tehnik dalam menyelesaikan masalah.

Kendala di BP4 Kota Semarang adalah suami istri yang bermasalah tersebut sudah mengambil keputusan akhir untuk bercerai, sehingga walau diberi penasihat tidak berpengaruh. Mereka datang ke BP4 hanya untuk formalitas yaitu untuk minta surat ijin cerai sebagai syarat untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Biasanya surat ini dimintakan ke Kandepag kota Semarang bagi Pegawai Negeri yang ingin bercerai. Dalam hal ini penyelesaiannya adalah memberi kesempatan kepada pasangan suami istri yang bermasalah tersebut untuk berpikir ulang setelah diberi penasihat perkawinan serta pemahaman mengenai arti bahayanya bila terjadi perceraian

Kendala yang lain adalah masuknya pihak ketiga dalam persoalan rumah tangga keluarga tersebut, seperti orang tua, saudara ataupun orang lain seperti suami/istri simpanan yang berkaitan dengan harta warisan anak maupun harta gono gini. Untuk menanggulangi masalah ini penasihat perkawinan bisa memanggil suami istri tersebut tapi dengan beberapa kali sidang. Sidang pertama dihadiri istri agar mengungkapkan apa yang dijadikan masalah, selanjutnya mengundang suami untuk mengetahui masalah dari versi suami dan pada sidang ketiga mengundang kedua belah pihak untuk mencari pemecahan bersama menjadikan satu informasi yang ada. Kalau hasil beda mereka diberi wejangan-wejangan agar tercapai titik temu atau islah.

## B. SARAN-SARAN

1. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) hendaknya selalu meningkatkan kinerja dan daya guna sehingga bisa lebih efektif dalam memberikan penasihat perkawinan sehingga bisa mencegah dan mengurangi jumlah perceraian.
2. Hendaknya Pengadilan Agama tidak dengan mudah menyetujui perceraian kecuali kalau kedua suami istri yang ingin bercerai tersebut sudah datang ke BP4 dan diberikan penasihat secara tuntas bahkan jalan perdamaian juga sudah dilaksanakan tetapi kedua orang tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi.
3. Tidak berprasangka bahwa BP4 berusaha untuk mempersulit persoalan, tetapi BP4 sebetulnya malah membantu kedua pasangan yang berselisih tersebut ke arah kedamaian dan kebahagiaan.
4. Menjadikan BP4 menjadi sahabat yang baik bagi setiap keluarga.
5. Pentingnya penyuluhan kepada masyarakat mengenai Hukum perkawinan dan perceraian serta aspek-aspeknya guna meningkatkan kualitas perkawinan dan mengurangi angka perceraian.
6. BP4 kota Semarang sebelum memberikan Surat Ijin Cerai hendaklah tidak gampang menyerah dan selalu berusaha memberikan penasihat yang terbaik sehingga rencana perceraian dapat dicegah dengan demikian dapat meningkatkan mutu perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Kelib ,SH, 1982, Diktat Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro, Semarang

Affandi, Ali, SH, 1993, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, PT  
Bina Aksara, Jakarta

Affandi, Ali, SH, Prof, 1986, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum  
Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bina Aksara,  
Jakarta

Ar Ba'in Mahmud H ,DRS, 1985, Buku Pintar Keluarga Muslim, Semarang

Budiwanti, Erni, Dr, 1 Januari 2000, Islam Sasak Waktu Telu Versus Waktu  
Lima, LKIS Yogyakarta Kerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan  
Ford Fondation

Busyar, Muhammad, Prof, SH, 1981, Pokok Hukum Waris, Pradnya Paramitha,  
Jakarta

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan enyelenggaraan Haji Proyek  
Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001, Pedoman Konselor  
Keluarga Sakinah, Departemen Agama R.I., Jakarta

Djoyo diguno, MM, Prof, Mr, 1985, Asas-asas Hukum Adat, Yayasan Penerbit  
Gajah Mada

**UPT-PUSTAK-UNDIP**

Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju,  
Bandung

Hadikusuma, Hilman, 1983, Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung

Mahmud Yunus, H, DR, Prof, 1991, Hukum Perkawinan Dalam Islam, PT  
Hidakarya Agung, Jakarta

Muttaqien H. Z., Drs, 2004, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Proyek  
Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan  
Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R. I.,  
Jakarta

Prawirohamidjojo, Soetojo, R, SH, dan Aziz Safioedin, 1986, Hukum Orang dan  
Keluarga, Alumni, Bandung

Ronny Hanityo Soemitro ,SH, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan  
Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta

Satrio, J., SH, 1991, Hukum Harta Perkawinan, PT Citra Aditya, Bandung

Subekti, 1984, Pokok-pokok Hukum Perdata, Internusa, Jakarta

~~Soetojo~~ Prawiro Hamidjoyo, R, 1986, Hukum Orang dan Keluarga, Alumni,  
Bandung

Sofyan Hasan, K. N., SH dan Warkum Soemitro, SH, 1994, Dasar-dasar  
Memahami Hukum Islam di Indonesia, Usaha Nasional, Surabaya

Soekanto, Soerjono, SH, MA,DR, 1980, Intisari Hukum keluarga, Alumni,  
Bandung

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan  
dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Subekti, R, SH, Prof, dan R Tjitrosudibio, 1992, Kitab Undang-undang Hukum  
Perdata, PT Pradnya, Jakarta

Subekti, R, SH, Prof, R Tjitrosudibio, Undang-undang Perkawinan Indonesia

Sudiyat, Iman, 1981, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta

Sudarsono, 1991, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta

Surojo Wignyadipuro, 1971, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Alumni,  
Bandung

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid 2, 1989, Andi Offset, Yogyakarta

Sutrisno Hadi, 2000, Metodologi Research Jilid I, Andi, Yogyakarta

Sya'roni Ismail, H.M., Drs, 2003, Buku Pintar Keluarga Muslim, Semarang.

Tarmizi, DR, 1977, Marriage Counseling, Dalam Nasihat Perkawinan dan keluarga, Nomor 6 Tahun VI BP4 Pusat, Jakarta

Wantjik Saleh, K, 1976, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta

Wantjik Saleh, K, SH, 1974, Hukum Perceraian Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1990, Hukum Orang dan Keluarga, Alumni, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, SH, 1974, Hukum Perkawinan di Indonesia, Penerbit Sumur, Bandung